



ANALISIS PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS AKUN PENDAPATAN BLU X TERHADAP ATURAN TARIF YANG BERLAKU

Yasmin Nur Maryam

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Korespondensi penulis: ynurmaryam.12314@gmail.com

Abstrak. *This research discusses compliance audit on the revenue of BLU X in accordance with the applicable tariff rules by KAP LMR in 2023. The main objective of the research is to identify the level of compliance of BLU X with the tariff rules and the factors influencing this compliance. The research method used is a qualitative descriptive method through in-depth interviews, observations, and documentation. The audit results show that most transactions comply with the tariff rules, but there are discrepancies in tariff application due to a lack of understanding of the rules, suboptimal internal supervision, and insufficient socialization about changes in tariff rules. Auditors from KAP LMR play a crucial role in identifying these non-compliances and providing recommendations for improvement, such as enhancing internal control systems, training staff on tariff rules, and improving transaction documentation and verification. The conclusion of this research is that BLU X compliance can be enhanced by improving staff understanding of the applicable rules and strengthening internal supervision.*

Keywords: *BLU X; Compliance Audit; Internal Control; KAP LMR; Tariff Regulations*

Abstrak. Penelitian ini membahas audit kepatuhan atas pendapatan BLU X terhadap aturan tarif yang berlaku oleh KAP LMR pada tahun 2024. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan BLU X terhadap aturan tarif dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskripsi melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil audit menunjukkan sebagian besar transaksi mematuhi aturan tarif, namun terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan tarif yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap aturan, pengawasan internal yang belum optimal, dan kurangnya sosialisasi tentang perubahan aturan tarif. Auditor KAP LMR berperan penting dalam mengidentifikasi ketidakpatuhan ini dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan, seperti peningkatan sistem pengendalian internal, pelatihan staf tentang aturan tarif, dan perbaikan dalam dokumentasi dan verifikasi transaksi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kepatuhan BLU X dapat ditingkatkan dengan meningkatkan pemahaman staf terhadap aturan yang berlaku, dan memperkuat pengawasan internal.

Kata Kunci: *Aturan Tarif; Audit Kepatuhan; BLU X; KAP LMR; Pengendalian Internal*

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi yang semakin berkembang pesat, transparansi dan akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan entitas publik. Transparansi mengacu pada sebuah prinsip yang menjamin akses dan kebebasan serta kejelasan informasi terkait keuangan dan kegiatan entitas, sedangkan akuntabilitas mencakup tanggung jawab dan pertanggungjawaban suatu entitas terhadap penggunaan dana serta keputusan yang diambil (Setyanto et al., 2022). Kedua aspek ini tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga, tetapi juga membantu mengurangi dampak dari risiko-risiko yang tidak diinginkan. Implementasi transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci penting dalam menjaga integritas dan reputasi entitas publik, termasuk perguruan tinggi yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220 tahun 2016 yang membahas tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum menyebutkan bahwa BLU

merupakan lembaga yang berada di bawah lingkungan pemerintah juga dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan serta menjalankan kegiatan yang berfokus pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Perguruan tinggi yang berstatus BLU adalah lembaga pendidikan negeri yang didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terlebih dalam dunia pendidikan. Dalam pelaksanaannya, BLU tidak mengutamakan pencarian keuntungan, melainkan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan kecerdasan bangsa (Affan, 2021).

Pemeriksaan pendapatan pada perguruan tinggi berstatus Badan Layanan Umum (BLU) salah satu aspek penting dalam praktik akuntansi di Indonesia (Carolina, 2021). Dalam menjalankan fungsinya, penting bagi auditor melakukan prosedur audit yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan tarif yang berlaku dan memastikan integritas dalam praktik akuntansi. Namun dalam praktiknya, aturan tarif seringkali berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah atau kebutuhan internal perguruan tinggi. Perubahan ini bisa terjadi karena berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman terhadap aturan tarif, ketidaksesuaian antara praktik akuntansi yang dilakukan dengan aturan yang berlaku, serta minimnya pengawasan dan kontrol terhadap penerimaan pendapatan pada badan layanan umum. Aturan tersebut harus dipatuhi oleh BLU agar pendapatan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Oleh karena itu, auditor harus mengikuti perkembangan aturan tarif yang berlaku untuk memastikan proses audit yang dilakukan agar tepat dan akurat. Selain itu, komunikasi yang transparan dengan manajemen BLU juga menjadi kunci untuk mengatasi ketidaksesuaian dan memastikan keberlanjutan integritas dalam praktik akuntansi. Pada konteks ini, analisis mengenai kepatuhan pemeriksaan pendapatan BLU terhadap aturan tarif yang berlaku menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Dengan melakukan analisis tersebut, diharapkan bisa memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang praktik akuntansi yang dilakukan oleh BLU X serta menemukan solusi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan tarif yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis prosedur audit yang efektif dalam melakukan uji kepatuhan terhadap pendapatan BLU X dengan aturan tarif yang berlaku. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana kontribusi dalam peningkatan kualitas audit atas akun pendapatan pada BLU X serta membantu dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Manfaat penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang prosedur audit atas akun pendapatan BLU X serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu auditor dalam melakukan uji kepatuhan terhadap aturan tarif yang berlaku. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait, seperti auditor dan manajemen BLU, dalam meningkatkan pengelolaan pendapatan BLU X secara efektif dan efisien.

KAJIAN TEORI

Pengertian Badan Layanan Umum

Badan Layanan Umum (BLU) merupakan salah satu bagian dari struktur pemerintahan yang memiliki tujuan yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kontribusi barang dan jasa. Meskipun BLU diberikan kesempatan dalam mengutamakan finansial atau profit semata untuk mencari keuntungan, tetapi BLU lebih

memilih untuk fokus pada tujuan utamanya yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar bangsa yang lebih sejahtera. Hal ini dicapai dengan menerapkan praktik bisnis yang baik dan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas (Nuzulia, 2019).

Perguruan Tinggi Negeri Berbasis Badan Layanan Umum

Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang memiliki fleksibilitas lebih dalam pengelolaan pendapatan dan aset, serta memiliki fungsi-fungsi khusus yang membedakannya dari perguruan tinggi negeri lainnya. Fungsi ini mencakup peningkatan kualitas pendidikan, pengelolaan keuangan yang fleksibel, peningkatan penelitian dan pengembangan, kerjasama dengan industri, dan peningkatan layanan kepada masyarakat (Abdullah et al., 2023).

Definisi Pemeriksaan Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Teori Pemeriksaan

Menurut Ramadhany et al., (2021), audit merupakan suatu pemeriksaan sistematis dan kritis terhadap laporan keuangan suatu entitas yang dilakukan oleh pihak independen. Audit atau pemeriksaan menurut Abdurokhim (2020) adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan analisis sistematis dari pengendalian internal, catatan akuntansi, dan laporan keuangan perusahaan atau lembaga. Teori pemeriksaan dapat disimpulkan sebagai suatu proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis oleh pihak independen terhadap laporan keuangan, pengawasan internal, dan catatan akuntansi suatu organisasi yang bertujuan untuk memastikan keakuratan, keandalan, dan integritas informasi laporan keuangan, sehingga mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya, serta mematuhi standar akuntansi dan peraturan yang berlaku.

Teori Kepatuhan

Menurut Monika et al., (2022), kepatuhan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan harapan mendapatkan imbalan dan mengurangi kemungkinan hukuman yang diberikan. Kepatuhan menurut Fadillah et al., (2020) ialah mematuhi persyaratan, standar atau undang-undang yang ditentukan secara tepat yang biasanya disediakan oleh organisasi terakreditasi dalam bidang tertentu. Kepatuhan dapat disimpulkan sebagai perilaku atau tindakan yang dilakukan seseorang untuk mengikuti aturan, spesifikasi, atau standar yang telah ditetapkan secara resmi oleh otoritas atau lembaga yang berwenang dengan mengharapkan suatu imbalan untuk menghindari hukuman yang mungkin timbul akibat tidak mematuhi peraturan hukum yang berlaku.

Pengertian Pemeriksaan Kepatuhan

Menurut Puspita et al., (2019) Audit Kepatuhan atau yang sering disebut dengan *Compliance Audit*, merupakan proses penilaian yang dirancang untuk memastikan apakah suatu bisnis atau organisasi telah mematuhi semua peraturan, pedoman, dan

hukum yang berlaku. Tujuan dari audit ini adalah untuk mengidentifikasi kemungkinan pelanggaran atau ketidakpatuhan, menilai efektivitas mekanisme pengendalian yang ada, dan menjamin kepatuhan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Audit kepatuhan merupakan proses untuk memeriksa apakah entitas yang sedang diaudit telah mematuhi kebijakan, pedoman, dan arahan yang ditetapkan oleh pihak berwenang, serta bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem kerja yang berlaku dalam semua kegiatan operasional perusahaan atau entitas (Alfuzanni dan Djamil, 2019).

Pengujian *Compliance* atau Pengujian Kepatuhan adalah proses pemeriksaan yang mengevaluasi bagaimana rancangan, kebijakan, dan prosedur yang mengatur struktur pengendalian internal dalam suatu instansi. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal tersebut dalam mencegah dan mendeteksi kesalahan material dalam asersi laporan keuangan. Evaluasi dilakukan dengan cara memeriksa secara sampling transaksi bisnis dan pencatatan akuntansi untuk memastikannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh manajemen organisasi tersebut (Rahmatika dan Yunita, 2020).

Kesimpulannya, pemeriksaan kepatuhan ialah sebuah proses peninjauan yang digunakan untuk memastikan bahwa bisnis atau organisasi mematuhi perundang-undangan, peraturan, dan regulasi yang berlaku. Tujuannya adalah untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal, menemukan kemungkinan pelanggaran, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam penelitian pemeriksaan kepatuhan, penulis ingin mengetahui kesesuaian penerimaan pendapatan pada salah satu jasa layanan yang diberikan oleh BLU X yaitu Unit Layanan Bisnis, Jasa Dan Produksi dengan tarif yang berlaku, yaitu Aturan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Unit Layanan Bisnis, Jasa Dan Produksi Universitas X dan Aturan Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum X.

Pengertian Pendapatan

Menurut PSAK 23, pendapatan merupakan penerimaan bruto yang berasal dari manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh operasional rutin suatu entitas dalam jangka waktu tertentu, asalkan penerimaan tersebut menghasilkan peningkatan ekuitas yang bukan berasal dari investasi pemilik entitas. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (2008), Pendapatan pada Badan Layanan Umum (BLU) diartikan untuk menggambarkan penerimaan bruto dari keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari operasional BLU selama satu periode yang meningkatkan ekuitas bersih.

Pendapatan merupakan biaya yang dikumpulkan oleh setiap unit kerja, terutama di perguruan tinggi, baik yang berstatus PNB (Non BLU) maupun satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU). Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dibagi menjadi dua jenis berdasarkan sifatnya, yaitu PNB fungsional dan PNB umum. PNB fungsional yaitu pendapatan yang bisa langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran pada layanan umum, dan PNB umum yaitu pendapatan yang harus disetor terlebih dahulu ke kas negara sebelum dapat digunakan (Achmad Zamroni dan Muhammad Iqbal, 2022).

Kesimpulan menurut berbagai teori yang telah disampaikan, Pendapatan merujuk pada penerimaan bruto yang diterima oleh setiap satuan kerja, khususnya di perguruan tinggi, yang berasal dari manfaat ekonomi hasil dari aktivitas rutin dalam suatu periode. Penerimaan ini menyebabkan peningkatan ekuitas bersih entitas tersebut.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, yang berarti penelitian ini berfokus pada permasalahan yang ditemukan di lapangan dengan cara mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Menurut Putri (2023), Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan pendekatan induktif. Penelitian ini diawali dengan deskripsi peristiwa yang dijelaskan secara rinci dan diakhiri dengan simpulan yang bersifat umum berdasarkan deskripsi peristiwa tersebut. Jenis penelitian ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penulisan, yaitu untuk memperoleh informasi terkait pemeriksaan kepatuhan atas akun pendapatan BLU X terhadap aturan tarif yang berlaku.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen resmi, laporan keuangan BLU X, aturan tarif yang berlaku, jurnal, buku, dan publikasi lain yang relevan.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, terdapat tiga metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

1. Wawancara kepada partner dan senior auditor di KAP LMR selaku subjek dalam penelitian mengenai pemeriksaan pendapatan BLU X terhadap aturan tarif yang berlaku;
2. Melakukan observasi saat proses *vouching* dan pengujian atas akun pendapatan BLU berlangsung di KAP LMR sehingga dapat mempelajari lebih mendalam hal-hal yang relevan dengan topik penelitian;
3. Dokumentasi berarti mengumpulkan dan memeriksa dokumen terkait, seperti bukti pendukung yang dibutuhkan dan aturan tarif yang berlaku untuk mendapatkan pemahaman tambahan mengenai kebenaran pendapatan yang diperoleh pada catatan akuntansi.

Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, peneliti akan menggunakan berbagai metode pengumpulan data dan penggunaan sumber data yang sudah ada untuk memperoleh hasil penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Miles dan Huberman (1984) dalam Monika Shanty Ista Purta et al., (2022) menyatakan bahwa ada beberapa kegiatan yang terlibat dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan seluruh informasi yang diperoleh, mengelompokkan data ke dalam kategori sesuai jenisnya, dan memisahkan data yang tidak digunakan. Tujuan reduksi data adalah untuk menyajikan gambaran yang lebih terfokus dan mempermudah proses pengumpulan data bagi peneliti.

2. Penyajian data disajikan penulis dengan bentuk teks naratif dengan menganalisis kepatuhan pendapatan pada BLU X. Data disusun sesuai dengan pertanyaan penelitian untuk memudahkan penarikan kesimpulan dari informasi dalam data tersebut.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data, penulis akan menggunakan data yang telah dikumpulkan untuk menyimpulkan dan memberikan saran berdasarkan rumusan masalah yang ada. Dalam proses ini, penulis akan mengevaluasi kebenaran data serta mencari pemahaman yang mendalam sebelum membuat kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kantor Akuntan Publik (KAP) LMR dikenal sebagai salah satu yang menjunjung tinggi standar audit yang ketat dalam memastikan integritas dan transparansi laporan keuangan klien-kliennya. Dengan banyaknya pengalaman dalam menangani berbagai jenis bidang usaha, KAP LMR telah terbukti mampu memberikan layanan audit yang profesional dan terpercaya. Badan Layanan Umum (BLU) X merupakan universitas dengan status badan layanan umum. Sebagai institusi pendidikan, BLU X tidak hanya mengandalkan pendapatan dari jasa layanan pendidikan, tetapi juga dari berbagai jenis layanan lainnya. Pendapatan BLU X mencakup penyediaan barang dan jasa, serta kerja sama dengan berbagai lembaga atau badan usaha lainnya. Sebagai entitas publik yang mengelola sumber daya publik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya merupakan hal yang sangat penting. Pada tahun 2024, BLU X memutuskan untuk mempercayakan audit laporan keuangannya kepada KAP LMR. Keputusan ini menunjukkan kepercayaan BLU X terhadap kemampuan dan reputasi KAP LMR dalam melakukan audit yang komprehensif dan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Audit ini diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada *stakeholders* terkait keandalan informasi keuangan yang disajikan oleh BLU X serta memastikan bahwa operasi keuangannya dilaksanakan dengan integritas dan efisiensi yang tinggi.

Prosedur Audit Uji Kepatuhan atas akun Pendapatan

Prosedur audit atas akun pendapatan, khususnya dalam konteks Badan Layanan Umum (BLU), memegang peranan penting dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan tarif yang berlaku. Dengan adanya perubahan aturan tarif yang sering terjadi, auditor harus selalu memperhatikan dan mengikuti perkembangan tersebut untuk memastikan proses audit dilakukan dengan akurat dan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari pengauditan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis prosedur audit yang efektif dalam melakukan uji kepatuhan terhadap pendapatan BLU dengan aturan tarif yang berlaku. Berikut hasil wawancara mendalam dengan senior auditor KAP LMR:

“Auditor di KAP LMR untuk menguji kepatuhan atas penerimaan pendapatan pada klien BLU X terdapat 4 tahap yang dilakukan yaitu tahap pertama, penerimaan surat tugas artinya surat yang dibuat dari hasil perikatan KAP dengan klien. Tahap kedua adalah tahap perencanaan, pada tahap ini auditor memahami bisnis klien dan merancang pengujian substantif untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Tahap ketiga yaitu tahap pelaksanaan audit, di tahap ini pelaksanaan pengujian dan mengumpulkan bukti audit yang relevan, tahap terakhir adalah tahap pelaporan yang berisi laporan audit sesuai dengan temuan yang dihasilkan dari proses audit dan rekomendasi perbaikan”.

Dari pemaparan senior auditor yang menjelaskan pelaksanaan audit pengujian kepatuhan atas akun pendapatan BLU X dilakukan melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:

1. Tahap Penerimaan Surat Tugas

Yaitu surat yang dibuat dari hasil perikatan kantor akuntan publik dengan BLU X dengan melakukan pemahaman terhadap struktur organisasi BLU X, sistem pengendalian internal, dan aturan tarif yang berlaku berupa wawancara dan meminta beberapa dokumen yang dibutuhkan dalam pengauditan.

2. Tahap Perencanaan

Yaitu memahami bisnis klien dan melaksanakan pengujian substantif serta pengendalian internalnya dengan cara melakukan penelusuran dan mengumpulkan informasi yang cukup mengenai pemahaman bisnis klien.

3. Tahap Pelaksanaan Audit

Tujuan dari pelaksanaan pengujian audit ini yaitu untuk mengumpulkan bukti audit yang relevan dan memadai. Dalam melaksanakan pengujian ini, akan dilakukan observasi atau kunjungan ke BLU X untuk melakukan pemeriksaan, salah satunya pada sumber pendapatan BLU X yang diperoleh. KAP LMR akan melakukan pengujian substantif atas transaksi untuk memeriksa kepatuhan atas penerimaan pendapatan BLU X sebagai berikut:

- a. Auditor akan meminta rincian Buku Besar atau *General Ledger* untuk akun pendapatan BLU X selama satu periode;
- b. Auditor akan mengidentifikasi rincian buku besar dengan menentukan transaksi-transaksi sejenis, untuk pengujian ini berfokus pada salah satu sumber pendapatan dari unit layanan bisnis, jasa dan produksi;
- c. Melakukan sampling dari rincian transaksi buku besar sesuai dengan metode yang diterapkan oleh KAP LMR yaitu dengan melakukan penyaringan (*filter*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi transaksi yang relevan. Terdapat 2 fokus auditor dalam pengambilan sampel yakni:
 - 1) Memilih transaksi dengan nominal penerimaan terbesar. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sampling mencakup transaksi-transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap total pendapatan jasa yang diterima;
 - 2) Memilih klien yang sering melakukan pengujian pendapatan. Auditor juga memfokuskan pada klien yang secara rutin melakukan pengujian pendapatan dikarenakan klien ini mungkin memiliki *volume* transaksi yang tinggi atau memiliki kompleksitas tertentu dalam laporan pendapatannya, sehingga penting untuk memasukkan ke dalam sampling audit uji pendapatan.
- d. Auditor akan menyusun dan mengirimkan rekapitulasi permintaan dokumen transaksi sesuai dengan *list* sampling yang telah dilakukan dan yang harus dipenuhi oleh BLU X melalui *email*. Selanjutnya, BLU X akan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, termasuk dokumen yang terkait dengan penerimaan pendapatan selama periode tersebut diantaranya:
 - 1) Bukti pendukung dari setiap transaksi yang berhubungan dengan penerimaan pendapatan BLU X selama satu periode. Dokumen yang diminta oleh auditor mencakup Rekapitulasi Kuitansi Unit Layanan Bisnis, Jasa Dan Produksi (ULBJP) Tahun 2023, Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan (SPK), Tanda Terima Tunai (Kwitansi) Dan Faktur (*Invoice*).
 - 2) Aturan yang berlaku di BLU X terdapat 2 yaitu Aturan Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum X dan Aturan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Unit Layanan Bisnis, Jasa dan Produksi Universitas X.
 - 3) Kebijakan Akuntansi BLU X sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. X/KMK.05/2022.

- e. Setelah memperoleh dokumen yang diperlukan, auditor akan menyusun prosedur audit berupa pemeriksaan bukti pendukung (*vouching*) dan melakukan perhitungan kembali (*recalculating*) serta melakukan pengujian kepatuhan atas penerimaan pendapatan dengan aturan tarif yang berlaku apakah BLU X sudah patuh dengan cara:
 - 1) Kelengkapan dokumen pendukung, seperti apakah terdapat rincian nominal, uraian kegiatan, dan tanda tangan dari kepala unit layanan bisnis, jasa dan produksi, serta tanda tangan pemegang kas;
 - 2) Memastikan apakah terdapat Surat Perintah Pelaksana Pekerjaan (SPK);
 - 3) Memeriksa kesesuaian tanggal Surat Perintah Pelaksana Pekerjaan (SPK) dengan tanggal bukti *Invoice* (Faktur);
 - 4) Memastikan apakah terdapat *invoice* (Faktur);
 - 5) Memeriksa kesesuaian tanggal *invoice* (Faktur) dengan tanggal bukti kuitansi;
 - 6) Melakukan uji aritmatik (*detail* tagihan). Pada pengujian ini perlu dilakukan perhitungan kembali dan memastikan apakah perhitungan yang dilakukan sudah sesuai dengan tarif yang berlaku. Pada pengujian ini juga diperiksa apakah tarif yang digunakan sesuai dengan tarif yang berlaku sesuai aturan tarif penerimaan negara bukan pajak pada unit layanan bisnis, jasa dan produksi universitas X dan aturan penetapan tarif layanan badan layanan umum X.
 - 7) Kesesuaian nilai pada *invoice* dengan nilai pada bukti transaksi;
 - 8) Memastikan apakah terdapat tanda terima / slip bayar (Kuitansi);
 - 9) Memeriksa kesesuaian nilai slip bayar dengan Nilai *Invoice* (Faktur);
 - 10) Memeriksa kesesuaian tarif sesuai Surat Ketetapan (SK) tarif direktur No. 1234/PL19/KU/2021 tentang tarif penerimaan negara bukan pajak pada unit layanan bisnis, jasa dan produksi BLU X;
 - 11) Catatan pemeriksaan ini mencatat ketika ada dokumen pendukung yang tidak lengkap atau menemukan selisih ketika melakukan uji aritmatik (uji perhitungan) serta temuan yang lain.
- f. Jika pada perhitungan uji tarif penerimaan pendapatan menurut audit dan menurut *General Ledger* per 31 Desember 2023 sudah sesuai, maka auditor akan langsung membuat kesimpulan. Akan tetapi, apabila terdapat ketidaksesuaian tarif dengan aturan tarif yang berlaku akan dilakukan konfirmasi temuan tersebut kepada ketua tim untuk didiskusikan dan nantinya ketua tim akan melakukan konfirmasi pada BLU X.
- g. Apabila BLU X sudah melakukan konfirmasi dan menyesuaikan hasil klarifikasi atas temuan audit penerimaan pendapatan yang tidak sesuai dengan tarif atau tidak sesuai dengan periode berjalan, maka managing auditor membuat jurnal penyesuaian.
- h. Hasil akan dijabarkan dengan membuat kesimpulan audit atas pemeriksaan uji tarif penerimaan pendapatan BLU X dengan aturan tarif yang berlaku dan disampaikan kepada managing auditor.
- i. Auditor menyusun draft Laporan Audit yang kemudian diserahkan kepada manajer agar di review dan diserahkan kembali kepada partner.

4. Tahap Pelaporan

Partner akan memberikan *review draft* laporan audit sesuai dengan temuan yang dihasilkan dari proses audit, kesimpulan dan rekomendasi untuk perbaikan.

Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan BLU X

Berdasarkan studi dokumen yang dilakukan melalui prosedur audit *vouching* dan pengujian penerimaan pendapatan, ditemukan beberapa temuan penting, diantaranya terdapat perbedaan nominal atau selisih pada perhitungan aritmatika antara tarif layanan yang dihitung oleh manajemen ULBJP dan tarif yang ditetapkan oleh Badan Layanan Umum (BLU) X. Selisih ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan tarif yang dapat mempengaruhi laporan keuangan dan mengindikasikan potensi kesalahan dalam proses penetapan dan perhitungan tarif. Beberapa transaksi juga tidak memiliki bukti pendukung yang lengkap, seperti surat perintah pelaksanaan pekerjaan, faktur atau invoice, dan kwitansi. Ketidadaan dokumen-dokumen ini menimbulkan masalah dalam proses verifikasi dan audit, serta mengurangi tingkat kepercayaan terhadap keabsahan transaksi tersebut. Temuan-temuan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal terkait proses penetapan tarif dan dokumentasi transaksi, yang perlu segera diperbaiki untuk memastikan akurasi dan keandalan laporan keuangan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Setelah melaksanakan pemeriksaan dengan bukti yang ada, peneliti melakukan wawancara dengan senior auditor terkait temuan-temuan yang didapatkan “Memang benar adanya temuan tersebut mengenai ketidaksesuaian penerimaan pendapatan Unit Layanan Bisnis, Jasa, dan Produksi (ULBJP) terhadap tarif yang sudah ditentukan oleh pihak BLU X. Ketidaksesuaian tersebut dikarenakan oleh pengendalian internal yang masih kurang maksimal serta kurangnya pengawasan dari manajemen pusat BLU X. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan terkait perubahan aturan tarif yang menyebabkan beberapa unit tidak sepenuhnya memahami aturan tarif yang berlaku. Sehingga terjadi ketidakpatuhan antara manajemen pengelolaan ULBJP dengan aturan penetapan tarif yang sudah ditetapkan”.

Berdasarkan kajian dokumen dan hasil wawancara dengan managing auditor, Universitas berbasis BLU X telah menerapkan kebijakan tarif sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan uji *compliance*, sebagian besar transaksi penerimaan pendapatan telah mematuhi aturan tarif yang telah ditetapkan oleh regulator. Hasil audit menunjukkan bahwa BLU X memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap aturan tarif yang berlaku. Namun, ditemukan beberapa ketidaksesuaian minor yang perlu diperhatikan. Meskipun secara umum tingkat kepatuhan yang tinggi, adanya ketidaksesuaian minor dengan aturan yang telah ditetapkan perlu adanya pemantauan yang lebih cermat terhadap proses administrasi dan pembaharuan peraturan tarif yang berlaku. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap perubahan aturan tarif, ketidaksesuaian sistem pencatatan dengan aturan yang berlaku, serta minimnya pengawasan internal.

Hasil observasi menunjukkan bahwa meskipun sistem pengendalian internal di BLU X sudah cukup memadai, namun masih terdapat beberapa area yang membutuhkan perbaikan seperti pengawasan terhadap penerimaan pendapatan yang perlu ditingkatkan untuk memastikan semua transaksi sesuai dengan aturan tarif yang berlaku. Selain itu, kepala unit ataupun staf keuangan perlu mendapatkan pelatihan berkelanjutan agar dapat memahami perubahan aturan tarif yang berlaku. Sistem informasi keuangan juga perlu diperbarui untuk mendukung pencatatan dan pelaporan yang lebih akurat dan tepat waktu.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Kepatuhan

Berdasarkan temuan penelitian yang sudah dilakukan, senior auditor mengatakan “Rekomendasi yang bisa kami berikan untuk perbaikan terkait penerimaan pendapatan, yaitu dengan meningkatkan pengawasan terhadap penerimaan pendapatan di Unit Layanan Bisnis, Jasa,

dan Produksi (ULBJP), lalu dengan memberikan pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada kepala unit dan juga staf keuangan tentang perubahan-perubahan dalam penetapan aturan tarif, selalu mendokumentasi dan verifikasi terhadap bukti-bukti pendukung juga harus ditingkatkan, yang terakhir monitoring dan evaluasi berkala juga perlu dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan tarif yang berlaku”.

Dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumen yang sudah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi dalam memperbaiki tingkat kepatuhan, transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan oleh BLU X. Langkah yang pertama, bisa dilakukan dengan meningkatkan pengawasan terhadap penerimaan pendapatan di Unit Layanan Bisnis, Jasa, dan Produksi (ULBJP). Dalam meningkatkan pengawasan terhadap pendapatan tersebut perlu adanya sistem pengendalian internal yang kuat dan ketat, seperti dengan menambahkan frekuensi dan intensitas audit internal, serta memastikan adanya pembagian tugas yang jelas antara staf bagian penetapan tarif dengan staf yang mengawasi penerimaan pendapatan ULBJP.

Rekomendasi selanjutnya dengan memberikan pelatihan serta sosialisasi yang berkelanjutan kepada kepala unit dan juga staf keuangan tentang perubahan-perubahan dalam penetapan aturan tarif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh manajemen BLU X dapat memahami dan menerapkan aturan tarif sesuai dengan aturan yang berlaku. Diperlukan juga peningkatan pada sistem informasi keuangan BLU X untuk mendukung pencatatan yang lebih akurat dan efisien serta dapat membantu dalam memastikan bahwa semua penerimaan pendapatan sesuai dengan tarif yang berlaku, sehingga mengurangi risiko kesalahan atau ketidaksesuaian.

Dokumentasi dan verifikasi juga harus ditingkatkan dalam memperbaiki kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas penerimaan pendapatan. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan memastikan setiap transaksi memiliki bukti pendukung yang lengkap seperti surat perintah pelaksanaan pekerjaan, faktur atau *invoice*, dan kwitansi, serta menerapkan prosedur *vouching* yang lebih ketat untuk meverifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen pendukung setiap transaksi. Tidak hanya itu, Monitoring dan evaluasi berkala juga perlu dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan tarif yang berlaku, dengan mengevaluasi rutin terhadap proses penetapan tarif dan penerimaan pendapatan serta implementasi sistem pemantauan *real-time* untuk mengidentifikasi dan mengatasi ketidaksesuaian segera setelah adanya transaksi.

Auditor juga memainkan peran yang sangat penting dalam memperbaiki kepatuhan BLU X terhadap aturan tarif yang berlaku. Prosedur audit yang ketat dan menyeluruh membantu mengidentifikasi area ketidakpatuhan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Auditor juga dapat membantu dalam memberikan pelatihan dan saran untuk memperkuat sistem pengendalian internal BLU X. Auditor tidak hanya berfungsi sebagai pemeriksa, tetapi juga sebagai konsultan yang membantu meningkatkan efisiensi dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan BLU X. Rekomendasi atau langkah yang terakhir diterapkan oleh BLU X adalah dengan meningkatkan komunikasi antara manajemen dan staf mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan tarif juga penting. Komunikasi yang lebih terbuka dan aktif akan membantu meningkatkan kesadaran staf akan konsekuensi dari pelanggaran aturan tarif dan dampaknya terhadap reputasi dan operasional BLU X.

Analisis atas Efektivitas Prosedur Audit yang diterapkan

Prosedur audit yang diterapkan oleh KAP LMR dalam mengaudit kepatuhan BLU X terhadap aturan tarif sudah cukup komprehensif dan sesuai dengan standar audit, yaitu Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), serta Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Namun, efektivitas audit ini masih bisa ditingkatkan lebih lanjut. KAP LMR dapat memperkuat pengujian

terhadap kepatuhan dengan melakukan pemeriksaan setiap prosedur lebih mendetail untuk memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh BLU X benar-benar sesuai dengan aturan tarif yang berlaku. Selain itu, memanfaatkan teknologi seperti perangkat lunak khusus untuk audit dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi proses audit secara keseluruhan. Menggunakan perangkat lunak khusus untuk audit juga bisa mempercepat proses pemeriksaan dan meningkatkan akurasi dengan mengurangi kesalahan manual. Dengan memperkuat aspek tersebut, KAP LMR dapat meningkatkan kualitas audit dan memastikan BLU X mematuhi aturan tarif dengan lebih baik, serta meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BLU X. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, KAP LMR perlu menyusun laporan kepatuhan yang mendetail dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, serta memastikan komunikasi yang terbuka antara auditor, manajemen BLU X, dan pemangku kepentingan lainnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis kepatuhan BLU X terhadap aturan tarif yang berlaku melalui prosedur audit yang diterapkan oleh KAP LMR. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun ada upaya yang dilakukan untuk mematuhi aturan tarif, terdapat beberapa area di mana kepatuhan belum optimal. Beberapa faktor yang menjadi penyebab ketidakpatuhan antara lain kurangnya pemahaman akan aturan tarif yang kompleks, pengawasan internal yang lemah, dan perubahan aturan tarif yang tidak selalu mudah dipahami atau diikuti. Auditor dari KAP LMR juga memiliki peran yang krusial dalam memastikan kepatuhan BLU X terhadap aturan tarif. Melalui prosedur audit yang diterapkan, auditor tidak hanya mengidentifikasi ketidakpatuhan, tetapi juga harus memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat membantu BLU X meningkatkan tingkat kepatuhannya di masa mendatang.

Saran untuk auditor agar mengikuti perkembangan aturan tarif dan mengintegrasikannya dalam prosedur audit. Auditor juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang praktis dan implementatif untuk meningkatkan kepatuhan BLU X. Manajemen diharapkan dapat mengambil langkah-langkah perbaikan berdasarkan temuan penelitian. Dan sebagai masukan bagi pembuat kebijakan untuk menyederhanakan dan memperjelas aturan tarif serta menyediakan panduan yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh entitas publik seperti BLU.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., Haris, H., Aslinda, A., & Nur, A. C. (2023). *Peran Strategis Badan Layanan Umum dalam Meningkatkan Efektivitas Good University Governance*.
- Abdurokhim. (2020). Prosedur Audit Vouching dan Pemeriksaan Fisik Aset Tetap di KAP CI untuk PT. RP. *Matriks Jurnal Sosial Dan Sains*, 1(2), 98–106. <https://doi.org/10.59784/matriks.v1i2.55>
- Achmad Zamroni, Muhammad Iqbal, S. (2022). *Panduan Perencanaan dan Penganggaran Program Pendidikan Islam 2023*. 4.
- Affan, N. (2021). Audit Manajemen Atas Piutang dan Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan. *Akuntabel*, 18(2).
- Alfuzanni, A., & Djamil, N. (2019). Peran satuan pemeriksaan internal untuk mewujudkan good university governance dengan audit kepatuhan sebagai variable moderating. *Sorot*, 14(2), 41. <https://doi.org/10.31258/sorot.14.2.41-51>

- Fadillah, D., Rahmayanti, D., & Fairuz Syifa, I. (2020). Studi Literatur Manajemen dan Risiko Kepatuhan pada Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(01). <https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.295>
- Monika Shanty Ista Purta, Nur Fitriyah, & Adhitya Bayu Suryantara. (2022). Analisis Pengakuan, Pengukuran Dan Pengungkapan Pendapatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1). <https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.183>
- Nuzulia, A. (2019). Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (2008).
- PMK No.220/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (2016).
- Putri, R. C. (2023). *ANALISIS MATERIALITAS PADA PROSEDUR AUDIT VOUCHING ATAS AKUN BEBAN OPERASIONAL*. 9(2).
- Rahmatika, D. N., & Yunita, E. A. (2020). *Auditing Dasar-Dasar Pemeriksaan Laporan*.
- Ramadhany, A. A., Fadlilah, A. H., & Masiam, S. (2021). Prosedur Audit Laporan Keuangan Pada Kantor Akuntan Publik Ery Dan Rekan. *Realible Accounting Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.36352/raj.v1i1.152>
- Setyanto, R., Ridloah, S., Suryasari, A., Ekonomi, F., & Negeri, U. (2022). *ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG*. 11(3), 228–238. <https://doi.org/10.29303/jmm.v11i3.737>
- Viera Valencia, L. F., & Garcia Giraldo, D. (2019). Audit Internal Pengendalian dan Kepatuhan. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 2).